

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Amandha Putri¹, Zamzami², Deki Irawan³

Universitas Jambi

Email: amandhaputri894@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan kondisi tingkat kemiskinan serta menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri atas 11 kabupaten/kota selama lima tahun sehingga diperoleh 55 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pemilihan model melalui uji Chow dan uji Hausman, sehingga diperoleh Fixed Effect Model sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar -5,449878 dan probabilitas 0,0000. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,092926 dan probabilitas 0,7566. Secara simultan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,984275 menunjukkan bahwa 98,43 persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan 1,57 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi Dana Alokasi Umum dapat mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan kapasitas fiskal, pembangunan, dan pelayanan publik, sedangkan efektivitas Dana Alokasi Khusus sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Kemiskinan, Regresi Data Panel.

Abstract

This study aims to analyze the development of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and poverty rate and to examine the effects of the General Allocation Fund and Special Allocation Fund on poverty rates in the regencies and municipality of Jambi Province during 2020–2024. The study uses secondary data obtained from Statistics Indonesia of Jambi Province and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. The panel dataset covers 11 regencies and municipality over five years, resulting in 55 observations. Panel data regression was employed, with model selection conducted using the Chow and Hausman tests, resulting in the Fixed Effect Model as the best model. The results show that the General Allocation Fund has a negative and significant effect on the poverty rate, with a coefficient of -5.449878 and a probability value of 0.0000. The Special Allocation Fund has a negative but insignificant effect, with a coefficient of -0.092926 and a probability value of 0.7566. Simultaneously, the General Allocation Fund and Special Allocation Fund significantly affect the poverty rate. The coefficient of determination (R^2) of 0.984275 indicates that 98.43 percent of the variation in poverty rates is explained by the

General Allocation Fund and Special Allocation Fund, while 1.57 percent is explained by other factors outside the model. These findings indicate that optimizing the General Allocation Fund can support poverty reduction through stronger fiscal capacity, development, and public services, while the effectiveness of the Special Allocation Fund depends strongly on targeting and the quality of regional development program implementation

Keywords: *General Allocation Fund, Panel Data Regression, Poverty, Special Allocation Fund*

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasar dan berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perumahan, serta pelayanan publik. Karena itu, pengurangan kemiskinan menjadi salah satu sasaran penting pembangunan nasional dan daerah (Sabitta et al., 2024).

Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Dua instrumen yang penting adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum diarahkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada dasarnya bukan instrumen yang dirancang secara langsung untuk mengurangi kemiskinan. Pengaruh keduanya terhadap kemiskinan lebih bersifat tidak langsung melalui pembangunan daerah, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, pemberian kewenangan dan sumber daya kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyediaan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat (Oates, 1972; 1993, dalam Kresna et al., 2021). Dengan demikian, peningkatan dana transfer belum tentu secara otomatis diikuti oleh penurunan kemiskinan karena hasil akhirnya dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran dan ketepatan program pembangunan.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penerima Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Selama 2020–2024, tingkat kemiskinan Provinsi Jambi menunjukkan perubahan dari 7,58 persen pada 2020 menjadi 8,09 persen pada 2021, kemudian menurun menjadi 7,62 persen pada 2022, 7,58 persen pada 2023, dan 7,10 persen pada 2024. Pada saat yang sama, realisasi Dana Alokasi Umum tingkat provinsi meningkat dari Rp7.502,96 miliar pada 2020 menjadi Rp8.118,04 miliar pada 2024, sedangkan Dana Alokasi Khusus berfluktuasi dari Rp3.040,78 miliar pada 2020 menjadi Rp2.822,02 miliar pada 2024.

Perbedaan perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan dana transfer dan perubahan tingkat kemiskinan tidak selalu bergerak searah. Pada tingkat kabupaten/kota juga terdapat perbedaan kondisi yang cukup besar. Pada 2024, tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 10,14 persen, sedangkan terendah terdapat di Kota Sungai Penuh sebesar 2,92 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik sosial ekonomi, kapasitas fiskal, kebutuhan pembangunan, dan kualitas pengelolaan anggaran antarwilayah.

Penelitian terdahulu juga memperlihatkan hasil yang beragam. Prasetyo dan Aida (2022) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sembiring et al. (2024) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Sebaliknya, Nany et al. (2022) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Tassya dan Nailufar (2024) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, sedangkan Triyulianto et al. (2024) menemukan hasil yang berbeda untuk Dana Alokasi Umum. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas transfer fiskal dalam memengaruhi kemiskinan dapat bergantung pada karakteristik daerah, periode penelitian, serta efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan tingkat kemiskinan serta menguji pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2020–2024.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel. Unit analisis terdiri atas 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yaitu Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Periode pengamatan adalah 2020–2024 sehingga diperoleh 55 observasi.

Data tingkat kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, sedangkan data Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin. Variabel independen terdiri atas Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang digunakan dalam bentuk logaritma natural sebagaimana model estimasi pada skripsi.

Model regresi data panel diestimasi dengan tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan hasil penelitian, uji Chow menghasilkan probabilitas 0,0000 sehingga Fixed Effect Model lebih tepat daripada Common Effect Model. Uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,0010 sehingga Fixed Effect Model lebih tepat daripada Random Effect Model.

Model empiris yang digunakan adalah: $KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 LOGDAU_{it} + \beta_2 LOGDAK_{it} + \varepsilon_{it}$. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen melalui uji t dan uji F. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Kondisi Tingkat Kemiskinan

Penelitian ini menggunakan data 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Kondisi Tingkat Kemiskinan. Analisis perkembangan dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai perubahan kondisi fiskal daerah dan tingkat kemiskinan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh DAU dan DAK terhadap tingkat kemiskinan.

Perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi menunjukkan pola yang cenderung meningkat setelah mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Dana Alokasi Umum menurun sebesar 1,57 persen, kemudian relatif stabil pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 0,04 persen. Selanjutnya, Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 3,64 persen pada tahun 2023 dan 6,16 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Dana Alokasi Umum pada akhir periode penelitian cenderung meningkat (DJPk Kementerian Keuangan RI, 2020–2024).

Berbeda dengan Dana Alokasi Umum, perkembangan Dana Alokasi Khusus menunjukkan pola yang lebih berfluktuasi. Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan sebesar 5,56 persen pada tahun 2021, kemudian meningkat sebesar 9,58 persen pada tahun 2022. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar 20,19 persen dan tetap meningkat sebesar 18,46 persen pada tahun 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan Dana Alokasi Khusus lebih dinamis dari tahun ke tahun karena diarahkan untuk mendukung kebutuhan dan prioritas pembangunan tertentu di daerah (DJPk Kementerian Keuangan RI, 2020–2024).

Sementara itu, tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang berbeda antarwilayah. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, yaitu 10,95 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 11,39 persen pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 10,14 persen pada tahun 2024. Sebaliknya, Kota Sungai Penuh memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, yaitu 3,03 persen pada tahun 2020 dan menurun menjadi 2,92 persen pada tahun 2024. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi sosial ekonomi antarwilayah di Provinsi Jambi.

Secara umum, peningkatan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada periode 2022–2024 berlangsung bersamaan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Namun, kondisi tersebut belum dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat secara langsung karena pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan bergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Hasil estimasi regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024. Analisis ini merupakan kelanjutan dari

pembahasan mengenai perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan tingkat kemiskinan yang telah diuraikan sebelumnya. Pembahasan perkembangan tersebut memberikan gambaran mengenai perubahan kondisi fiskal daerah dan tingkat kemiskinan selama periode penelitian, sedangkan analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh variabel fiskal tersebut terhadap tingkat kemiskinan secara empiris.

Penggunaan regresi data panel dalam penelitian ini memungkinkan pengamatan terhadap karakteristik masing-masing kabupaten/kota sekaligus perubahan yang terjadi selama periode 2020–2024. Dengan demikian, analisis tidak hanya memperhatikan perubahan variabel dari tahun ke tahun, tetapi juga mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik antarwilayah di Provinsi Jambi. Pendekatan tersebut digunakan agar hasil estimasi dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan.

Sebelum dilakukan estimasi regresi, terlebih dahulu dilakukan pemilihan model yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Pemilihan model dilakukan dengan membandingkan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model melalui pengujian yang telah ditentukan dalam analisis regresi data panel. Tahapan pemilihan model tersebut diperlukan untuk memperoleh model yang mampu memberikan estimasi paling sesuai dalam menjelaskan hubungan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, Fixed Effect Model terpilih sebagai model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Model tersebut mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik khusus pada masing-masing kabupaten/kota yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan Fixed Effect Model, perbedaan karakteristik antarwilayah dapat dikendalikan sehingga estimasi pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan lebih tepat. Hasil estimasi Fixed Effect Model selanjutnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: KM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/22/26 Time: 00:48				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.54788	7.000144	6.078144	0.0000
LOG_DAU	-5.449887	1.105100	-4.931578	0.0000
LOG_DAK	-0.092929	0.297822	-0.312030	0.7566

Fixed Effects (Cross)			
Kerinci--C		-0.017087	
Merangin--C		2.236882	
Sarolangun--C		0.839281	
Batang Hari--C		2.030307	
Muaro Jambi--C		-2.672028	
Tanjung Jabung Timur--C		2.953821	
Tanjung jabung Barat--C		1.862485	
Tebo--C		-1.417911	
Bungo--C		-1.708061	
Kota Jambi--C		2.044601	
Kota Sungai Penuh--C		-6.152290	
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.987245	Mean dependent var	7.507818
Adjusted R-squared	0.983601	S.D. dependent var	2.397291
S.E. of regression	0.306994	Akaike info criterion	0.679084
Sum squared resid	3.958293	Schwarz criterion	1.153545
Log likelihood	-5.674809	Hannan-Quinn criter.	0.862562
F-statistic	270.9071	Durbin-Watson stat	2.241989
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan EViews 12, 2026.

Uji pemilihan model menunjukkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang paling sesuai. Uji Chow menghasilkan probabilitas 0,0000, lebih kecil dari 0,05, sehingga model Fixed Effect dipilih dibandingkan Common Effect. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,0010, juga lebih kecil dari 0,05, sehingga Fixed Effect dipilih dibandingkan Random Effect.

Hasil estimasi menghasilkan persamaan $KM = 42,54788 - 5,449887 \text{ LOGDAU} - 0,092929 \text{ LOGDAK}$. Koefisien Dana Alokasi Umum bernilai -5,449878 dengan probabilitas 0,0000. Artinya, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Arah negatif menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum cenderung diikuti penurunan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Temuan tersebut sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan bahwa transfer fiskal dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Ketika Dana Alokasi Umum dikelola secara efektif untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik, kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih besar. Pandangan tersebut sejalan dengan Oates (1972; 1993) sebagaimana dirujuk dalam Kresna et al. (2021).

Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus memiliki koefisien -0,092929 dengan probabilitas 0,7566. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Walaupun arah koefisien negatif, pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan bahwa perubahan Dana Alokasi Khusus secara nyata menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan selama periode penelitian.

Tidak signifikannya Dana Alokasi Khusus dapat dipahami dari sifat penggunaannya yang lebih spesifik. Dana tersebut diarahkan pada kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional sehingga manfaatnya terhadap kemiskinan sangat bergantung pada ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta keterkaitan program dengan kebutuhan kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, besarnya dana saja belum menjamin adanya dampak yang langsung terlihat pada indikator kemiskinan.

Nilai R-squared sebesar 0,987245 menunjukkan bahwa sekitar 98,72 persen variasi tingkat kemiskinan dalam model dapat dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan sekitar 1,28 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Secara substantif, hasil ini menunjukkan bahwa kedua instrumen transfer fiskal secara bersama-sama memiliki keterkaitan yang kuat dengan variasi tingkat kemiskinan, meskipun secara parsial hanya Dana Alokasi Umum yang terbukti signifikan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi dan berbeda antarwilayah. Dana Alokasi Umum cenderung meningkat pada akhir periode, Dana Alokasi Khusus mengalami fluktuasi, sedangkan tingkat kemiskinan Provinsi Jambi menurun setelah mengalami peningkatan pada 2021. Hasil regresi Fixed Effect Model menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas transfer fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh pemanfaatan dan kualitas program pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah di Provinsi Jambi perlu mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum untuk program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang lebih tepat sasaran serta mengintegrasikan program yang didanai dengan kebijakan pengurangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2024). Provinsi Jambi dalam Angka dan data kemiskinan kabupaten/kota, 2020–2024. Jambi: BPS Provinsi Jambi.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020–2024). Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Jambi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Prasetyo, A., & Aida, N. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
- Sembiring, & Diana, F. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. 2(4), 37–48.
- Sinring, B., & Hamid, M. (2020). Analysis the Effects of Poverty, General Allocation Fund and Economic Growth to Human Development Index (HDI) in Indonesia. 3(2), 1–12.
- Syahidin, S., & Jalil, M. A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. Gajah Putih Journal of Economics Review, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i1.162>
- Tassya, A., & Nailufar, F. (2024). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Alokasi Khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(1).
- Triyulianto, T., Rizkia Nurvita, B. S., & Hidayaturahmi. (2024). Pengaruh realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, belanja bantuan sosial dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan. Jurnal Good Governance, 20(2), 111–128. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i2.807>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yuvanda, S., Rasjid, M. R., & Herlin, F. (2023). Dampak Dana Perimbangan terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Journal Development, 11(2), 90–96. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.310>